

PENGARUH PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KONTINUITAS USAHA

(Survei pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya)

Rita Tri Yusnita

(Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE Universitas Siliwangi Tasikmalaya)

Ami Yuniasari

(Alumni Jurusan Akuntansi FE Universitas Siliwangi)

Abstract

The purpose of this research to analyzing the influence of internal audit on continuity of activity. This research, writer use method of survey at People Credit Bank in region of Tasikmalaya, where the data was collected conduct trough of field and librarian research. Field research was conducted observation, interview, and send the questioner. And than those data is analyzed by using statistical method in this case by using Pearson's correlation Analyzing of Product Moment and Determination Coefficient. The result of calculation which writer is obtained by the level of correlation coefficient value to 0,948. Level of coefficient value of determination is 89,9%, by using statistical t at level of confidence is 95%. In the really $t_{calculate} > t_{tables}$ ($5,965 > 2,776$). This means alternative hypothesis is accepted. Based of result from the calculation, indicate that internal audit with continuity of activity have strong relation, and also there are influence which significant between internal audit and continuity of activity.

Keyword : Internal Audit, Continuity of Activity

Pendahuluan

Keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh terhadap perkembangan bidang lain diantaranya bidang ekonomi sektor perbankan. Dilihat dari operasionalnya, wilayah luasnya dinegara kita lebih menonjolkan bank, hal ini karena bank lebih mendorong perkembangan perekonomian yang lebih baik. Bank yang dalam kegiatan sehari-seharinya merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2004, PSAK No.31, paragraf 2) menyatakan bahwa "Bank merupakan industri jasa yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat". Mengingat kepercayaan masyarakat merupakan modal pokok dari kegiatan

usaha bank, sementara dilain pihak bahwa bank merupakan urat nadi bagi kelancaran kegiatan perekonomian melalui fungsinya sebagai *intermediary service*. Menciptakan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank, tidak hanya menjadi tanggungjawab industri perbankan, akan tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah dengan lembaga - lembaga terkait . Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga kontinuitas usaha bank.

Pertumbuhan dunia perbankan, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, ditandai dengan semakin banyaknya bank-bank yang membuka cabang baru didaerah, terutama pada saat ini otonomi daerah telah berlaku. Sehingga, perbankan yang bersifat daerah baik yang ada mupun yang baru mulai melaksanakan fungsinya dengan baik. Akan tetapi,

banyak bank-bank umum baik swasta maupun negeri yang mapan terus bertambah dengan membangun kantor-kantor cabang di daerah. Dengan bertambahnya jumlah bank tersebut, maka secara langsung akan berdampak pada kontinuitas usaha dari bank itu sendiri. Setiap bank dituntut untuk memiliki strategi agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah persaingan yang semakin ketat. Dilain pihak bank yang dimiliki daerah yang berstatus perusahaan daerah (PD) yang mempunyai kemampuan yang terbatas harus bertahan dan bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang mempunyai kegiatan utama pemberian kredit. Dimana modalnya merupakan bagian terbesar dari asset yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat ini. Sehingga, kebijakan dari Bank Perkreditan Rakyat dalam pelayanan jasa terhadap debitur disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Penghasilan bunga dari kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan dan kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjamin pengembalian kredit tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Tidak kembalinya kredit yang diberikan oleh bank secara langsung akan mengancam kontinuitas usaha bank itu sendiri. Hal tersebut karena penghasilan bank yang utama adalah dari bunga yang dikenakan terhadap kredit-kredit yang diberikan.

Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal utama yang menjadi kunci sukses BPR dalam pelayanan tersebut adalah lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman. Sayangnya, Selain harus bersaing dengan bank umum, dari sisi permodalan BPR memiliki keterbatasan, faktor lainnya adalah kualitas SDM. Dan selain itu wilayah cakupan BPR yang sangat terbatas dengan aturan main yang hanya sebatas simpan pinjam, juga menjadi kendala lain yang harus dihadapi BPR. Termasuk aturan kepemilikannya. Sehingga, BPR harus tetap menjadi bank kecil tidak boleh jadi bank besar. Karena itu suku bunganya tinggi, yang akan berakibat pada minat masyarakat dalam menanamkan modal dalam dunia perbankan, sehingga tingkat kecukupan modal yang diperoleh akan terpengaruh dan selanjutnya akan berakibat pada tingkat perolehan laba. Oleh karena itu, dalam kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat dihadapkan kepada berbagai risiko antara lain risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko terkonsentrasinya transaksi.

Agar kontinuitas usaha dapat dipertahankan, maka sangat perlu bagi perusahaan untuk menetapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi saat ini untuk meningkatkan kinerja atau paling tidak untuk mempertahankan kinerja yang sudah dicapai. Untuk meningkatkan kinerja tersebut dilakukan suatu pola pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada dasarnya tidak membedakan antara Bank Umum dengan BPR.

Pada hakekatnya perusahaan baik yang menjadi milik pemerintah maupun yang menjadi milik swasta adalah bertujuan untuk memperoleh laba yang wajar dan berusaha

untuk mempertahankan kontinuitas usahanya dengan menggunakan segala kemampuan serta sumber daya yang telah tersedia yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup anggota/karyawan perusahaan, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Agar tujuan perusahaan memperoleh laba yang optimal guna mempertahankan kontinuitas usaha dapat tercapai, perusahaan dipacu berusaha untuk dapat mengandalikan jalannya aktivitas perusahaan dari faktor - faktor penyelewengan, penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian yang baik diperlukan oleh semua aspek usaha, terutama apabila melibatkan harta - harta perusahaan. Untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, maka diperlukan pengawasan yang lebih baik demi mempertahankan kontinuitas usaha dimasa yang akan datang.

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka akan semakin banyaknya kegiatan yang ada di perusahaan. Dengan demikian pimpinan akan memerlukan bagian yang khusus mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Bagian khusus ini disebut sebagai pemeriksaan intern. Dimana pemeriksaan intern merupakan bantuan bagi pimpinan dalam rangka untuk mengusahakan agar kegiatan organisasi berjalan sebagaimana mestinya.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan intern pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana kontinuitas usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan intern terhadap kontinuitas Usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Kerangka Pemikiran

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan dan juga bank sebagai perantara atau intermediasi antara pihak-pihak yang berkelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Y. Sri Susilo, 2000 : 7). Dengan demikian semakin banyaknya atau semakin meningkatnya aktivitas perusahaan, maka pimpinan memerlukan suatu alat bantu atau alat kendali yaitu sebagai pengawas pelaksanaan struktur pengendalian intern, yaitu dengan adanya pemeriksa intern.

Pemeriksaan intern timbul karena adanya keterbatasan pimpinan atau manajemen dalam melakukan pengendalian secara langsung. Secara umum pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya harus independen yang mana membantu manajemen dalam mencapai operasi dan administrasi perusahaan yang efektif dan efisien.

Pemeriksaan intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP (2001 : 322) adalah :

“Suatu aktivitas yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen”

Tugas dan tanggungjawab pemeriksaan intern adalah melakukan pengkajian dan penilaian atas semua bentuk pengendalian kegiatan perusahaan untuk memastikan sejauhmana hal penyelewengan, penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Tujuan utama perusahaan pada dasarnya adalah mencari keuntungan (*profit oriented*) untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, agar tercapai suatu kondisi perusahaan yang stabil dan *going concern* dalam usahanya.

Adapun yang dimaksud dengan kontinuitas usaha menurut Suwardjono (2005:222) adalah sebagai berikut:

“konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala, atau rencana pasti dimasa yang akan datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas.”

Perusahaan tidak didirikan untuk usaha-usaha yang sporadik dan berjangka pendek dan begitu hasil yang diinginkan tercapai kemudian perusahaan dilikuidasi. Karena likuidasi bukan merupakan harapan yang umum dalam pendirian perusahaan, harapan logis dan masuk akal justru kontinuitas usaha. Walaupun demikian, dalam kasus atau kondisi tertentu yang memberi gejala atau kepastian bahwa perusahaan akan mengalami masalah dengan kelangsungan hidupnya, perlakuan akuntansi khusus atas dasar likuidasi dapat diterapkan. (Suwardjono, 2005:223)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP . (2001:341.3-341.4), terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi kontinuitas usaha diantaranya:

- a. Trend negatif sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, *ratio* keuangan penting yang jelek.
- b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.

- c. Masalah intern sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan yang besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
- d. Masalah luar yang terjadi sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan *franchise*, lisensi, atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang memadai.

Agar tujuan perusahaan guna mempertahankan kontinuitas usaha dapat tercapai, perusahaan dipacu berusaha untuk dapat mengendalikan jalannya aktivitas perusahaan dan melindungi harta perusahaan dari faktor-faktor penyelewengan, penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu bagian tersendiri yang sifatnya independen yaitu bagian pemeriksaan intern yang melakukan pengawasan serta pengendalian yang terus menerus, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Pemeriksaan Intern Berpengaruh Signifikan Terhadap Kontinuitas Usaha”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia,

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moh.Nazir, 2003:63).

Sedangkan metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah. Metode ini membedah dan menguliti serta mengenal masalah-masalah untuk dapat mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.(Moh. Nazir,2003;65).

3. Hasil penelitian dan Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian ini akan menunjukkan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi lokasi

penelitian, meliputi pemeriksaan intern dan kontinuitas usaha. Peneliti mengambil 6 PD. BPR Pemerintah Daerah kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel penelitian, dimana BPR-BPR tersebut adalah sebagai berikut :

1. PD. BPR BKPD Rajapolah
2. PD. BPR BKPD Cisayong
3. PD. BPR BKPD Cibeureum
4. PD. BPR BKPD Indihiang
5. PD. BPR Bank Pasar Rajapolah
6. PD. BPR Bank Pasar Indihiang

Hasil Penelitian

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden yang menanyakan mengenai pendapatnya tentang pemeriksaan intern yang dilakukan di masing-masing Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Setelah jawaban terkumpul, kemudian diberi atribut dan selanjutnya diberi skor untuk tiap masing-masing jawaban.

Tabel 3.1
Skor Atas Pendapat Responden Tim Pemeriksa Intern Atas pemeriksaan Intern

NO. RESPONDEN	Pemeriksaan Intern					Jumlah
	Independensi	Kemampuan Profesional	Lingkup Pekerjaan	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan	Manajemen bagian pemeriksa intern	
1	20	20	30	28	34	132
2	16	19	24	24	31	114
3	17	21	24	24	31	117
4	21	25	30	30	39	145
5	15	20	24	24	29	112
6	16	19	23	23	29	110
Jumlah	105	124	155	153	193	730

Sumber : Data Primer

Dari data diatas dapat dilihat bahwa skor total tertinggi untuk variabel pemeriksaan intern, yaitu sebesar 145, yang dapat dirata-ratakan dari 30 pertanyaan mempunyai bobot sebesar 4,83 atau bobot total 96,67% ($145/150 \times 100\%$), angka ini diambil dari jumlah skor tertinggi variabel

pemeriksaan intern yaitu sebesar 145 dan angka 150 diambil dari skor maksimum/skor yang ditargetkan dari variabel pemeriksaan intern. Berdasarkan klasifikasi penilaian yang telah dikemukakan, maka pemeriksaan intern di PD. BPR tersebut termasuk dalam kriteria

sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator independensi dan objektivitas bahwa para pemeriksa intern diberikan keleluasaan dalam melakukan penugasan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan secara objektif. Dari indikator kemampuan profesional menyatakan bahwa dari staf pemeriksa intern mempunyai pengetahuan, keahlian dan latar belakang pendidikan yang sesuai, baik itu bidang akuntansi, manajemen, dan perbankan. Dari indikator lingkup pekerjaan menyatakan bahwa staf pemeriksa intern selalu meninjau keandalan informasi keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi. Meninjau berbagai alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dengan menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat, jadi dalam pelaksanaan pemeriksaan intern tujuan dan sasaran telah sesuai dengan tujuan organisasi. Dari indikator pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan intern menyatakan bahwa pemeriksa intern sangat bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas, pemeriksa intern mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan dengan menggunakan berbagai prosedur analitis pada saat menguji dan mengevaluasi informasi.

Dari indikator manajemen bagian pemeriksa intern menyatakan bahwa pimpinan pemeriksa intern memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan dan tanggungjawab untuk bagian pemeriksa intern.

Selain itu juga menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia, menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian pemeriksa intern. Dengan hal tersebut diatas berarti

tugas satuan pengawas intern dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPR yang diantaranya melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor pusat atau cabang dari unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan kemandirian dan ketertiban. Dan mengawasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi BPR serta memberi penilaian, pembahasan secara periodik atau berkala, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan relatif kecil.

Sedangkan skor terendah yang diperoleh dari variabel pemeriksaan intern, yaitu sebesar 110, yang dapat dirata-ratakan dari 30 pertanyaan mempunyai bobot sebesar 3,67 atau bobot total 73,33% ($110/150 \times 100\%$), angka ini diambil dari jumlah skor terendah variabel pemeriksaan intern yaitu sebesar 110 dan angka 150 diambil dari skor maksimum/skor yang ditargetkan dari variabel pemeriksaan intern. Berdasarkan klasifikasi penilaian yang telah dikemukakan, maka pemeriksaan intern di PD. BPR tersebut dalam kriteria baik.

Untuk dapat mengetahui skor kontinuitas usaha yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 3.2
Skor Atas Pendapat Responden Pimpinan Perusahaan Atas Kontinuitas Usaha

RESPONDEN	Kontinuitas Usaha				Jumlah
	Trend Negatif	Petunjuk Kemungkinan Kesulitan Keuangan	Masalah Intern	Masalah Luar yang Terjadi	
1	29	25	15	16	85
2	23	22	14	14	73
3	24	22	15	16	77
4	31	28	19	21	99
5	24	23	15	16	78
6	24	22	15	16	77
Jumlah	155	142	93	99	489

Sumber : Data Primer

Dari data diatas dapat dilihat bahwa skor total tertinggi untuk variabel kontinuitas usaha yaitu sebesar 99. yang dapat dirata-ratakan dari 22 pertanyaan mempunyai bobot sebesar 4,5 atau bobot total 90 % ($99/110 \times 100\%$), angka ini diambil dari jumlah skor tertinggi variabel kontinuitas usaha yaitu sebesar 99 dan angka 110 diambil dari skor maksimum/skor yang ditargetkan dari variabel kontinuitas usaha. Berdasarkan klasifikasi penilaian yang telah dikemukakan maka kontinuitas usaha di PD. BPR tersebut termasuk dalam kriteria sangat baik Hal tersebut dapat dilihat dari indikator trend negatif menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami kekurangan modal kerja, tidak pernah mengalami arus kas negatif dari kegiatan operasi, dan tidak pernah mengalami rasio keuangan penting yang jelek. Dan pimpinan selalu membuat berbagai kebijakan dan strategi agar tidak mengalami kerugian operasi. Dari indikator petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban, tidak pernah mengalami penunggakan pembayaran dividen, tidak pernah mengalami restrukturisasi utang, dan tidak pernah melakukan penjualan sebagian aktiva untuk membiayai operasi perusahaan. Dan pimpinan sangat mempertimbangkan berbagai kebijakan dan strategi yang dibuat agar perusahaan bisa memenuhi berbagai kewajiban. Dari indikator masalah intern

menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki ketergantungan yang besar atas sukses projek tertentu, *customer/nasabah* tertentu, dan tidak mempunyai perjanjian jangka panjang yang ternyata tidak menghasilkan laba. Dari indikator masalah luar yang terjadi menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah menghadapi pengaduan oleh pihak lain atau masalah-masalah lain yang membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi. Dan pimpinan selalu merencanakan untuk menangani permasalahan dari luar perusahaan. Dari pernyataan tersebut diatas bahwa tugas Direksi dalam melaksanakan tugas perencanaan, melaksanakan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian, seksi, cabang dan unit pelayanan berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat diindikasikan bahwa kontinuitas usaha yang terjadi pada PD. BPR tersebut dapat dipertahankan.

Sedangkan skor terendah yang diperoleh dari variabel kontinuitas usaha, yaitu sebesar 73. Yang dapat dirata-ratakan dari 22 item pertanyaan mempunyai bobot sebesar 3,3 atau bobot total 66,36% ($73/110 \times 100\%$), angka ini diambil dari jumlah skor terendah variabel kontinuitas usaha yaitu 73 dan angka 110 diambil dari skor maksimum/skor yang ditargetkan dari variabel kontinuitas usaha. Berdasarkan klasifikasi penilaian

yang telah dikemukakan, maka kontinuitas usaha di PD. BPR tersebut dalam kriteria cukup baik.

Pembahasan

Dari indikator independensi, rata-rata responden menyatakan memiliki sikap independensi dalam melakukan pengauditan dan posisi auditor pada PD. BPR dapat dikatakan menunjang terciptanya independensi dalam penugasan pemeriksaan. Para pemeriksa intern melakukan pemeriksaan secara objektif, namun masih ada diantara beberapa responden yang kadang melaporkan hasil pemeriksaan kepada direktur utama dan merasa kurang perlu dengan adanya rotasi secara periodik dalam penugasan audit. Juga selain itu, masih ada dari beberapa responden yang menyatakan masih tidak memiliki hubungan langsung dengan dewan atau manajemen senior.

Dari indikator kemampuan profesional, rata-rata responden menyatakan kecakapan teknis dan latar belakang pendidikan pemeriksa intern telah memadai dalam melakukan penugasan, para pemeriksa intern memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, begitu juga dengan kepemilikan kemampuan dalam menghadapi orang lain, dapat berkomunikasi secara efektif dan berpengalaman dibidangnya.

Dari indikator lingkup pekerjaan pemeriksa intern, rata-rata responden meninjau keandalan informasi keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi, selalu melakukan penilaian atas sistem yang ada untuk memastikan kepatuhan kepada kebijakan yang telah direncanakan, selalu menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya yang ada, serta selalu meninjau berbagai alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dari kerugian. Namun masih ada dari responden yang menyatakan kadang mempergunakan prosedur

pemeriksaan yang sesuai dan tepat pada saat memverifikasi keberadaan suatu harta.

Dari indikator pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan intern, rata-rata responden menyatakan bertanggungjawab merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, bertanggungjawab mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan dan mempergunakan berbagai prosedur pemeriksaan analitis pada saat menguji dan mengevaluasi informasi, dan terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir, serta laporan-laporan yang dibuat oleh pemeriksa intern mencantumkan berbagai rekomendasi. Juga selain itu, para pemeriksa intern meninjau dan melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dari indikator manajemen unit bagian pemeriksa intern, rata-rata responden menyatakan memiliki pernyataan tentang tujuan kewenangan dan tanggungjawab untuk bagian pemeriksa intern dan merasa perlu menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggungjawab bagian pemeriksa intern dan rata-rata pimpinan audit intern menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian pemeriksa intern serta membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf pemeriksa. Namun masih ada dari beberapa responden yang menyatakan kadang menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu dan kadang melakukan pengawasan atas pekerjaan pemeriksa intern.

Dari indikator trend negatif, kebanyakan responden menyatakan tidak pernah mengalami kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan

operasi, juga selain itu rata-rata pimpinan membuat berbagai kebijakan dan strategi agar tidak mengalami kerugian operasi yang berulang kali. Namun masih ada dari beberapa responden yang pernah mengalami kerugian operasi, rasio keuangan penting yang jelek dan yang masih membutuhkan modal kerja dari luar.

Dari indikator petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, kebanyakan responden menyatakan tidak pernah tidak memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang, tidak pernah mengalami penunggakan pembayaran dividen, tidak pernah mengalami restrukturisasi utang, dan tidak pernah melakukan penjualan sebagian aktiva untuk membiayai operasi perusahaan. Namun masih ada dari beberapa responden yang mempunyai kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru.

Dari indikator masalah intern, kebanyakan responden menyatakan tidak memiliki ketergantungan yang besar atas sukses proyek tertentu, *customer*/nasabah tertentu, dan tidak pernah mempunyai perjanjian jangka panjang yang ternyata tidak menghasilkan laba. Namun masih ada dari beberapa responden yang mempunyai kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

Dari indikator masalah luar yang terjadi, kebanyakan responden menyatakan tidak pernah menghadapi pengaduan gugatan pengadilan oleh pihak lain. Juga selain itu, rata-rata pimpinan merencanakan untuk menangani permasalahan dari luar perusahaan. Namun masih ada dari beberapa responden yang menyatakan bahwa pernah ada peraturan dari pemerintah yang berdampak negatif terhadap pendapatan, dan pernah kehilangan pelanggan/nasabah tertentu.

Adapun data yang akan dijadikan alat ukur yaitu skor total dari penilaian atas skor kuesioner yang telah teruji kevalidannya dan dinyatakan reliabel. Nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Skor Kuesioner Untuk Variabel Pemeriksaan Intern dan Kontinuitas Usaha

Responden	Var X	Var Y
1	118	80
2	100	69
3	102	72
4	128	92
5	99	72
6	95	72

Analisis Koefisien Korelasi

Pada output SPSS dinyatakan bahwa besar hubungan antara variabel pemeriksaan intern dengan kontinuitas usaha sebesar 0,948. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dan mempunyai hubungan yang positif sebesar 0,948.

Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan intern terhadap kontinuitas usaha, maka digunakan alat analisis koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS yaitu dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi, maka didapat nilai sebesar 0,899 atau 89,9 %.. Dengan nilai yang didapat sebesar 89,9 %. nilai tersebut dapat diartikan bahwa pemeriksaan intern mempengaruhi kontinuitas usaha sebesar 89,9 %. dan sisanya sebesar 10,1 %, dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya penerapan prinsip mengenal nasabah, *good management*, tingkat suku bunga simpanan atau pinjaman yang ditetapkan, kebijakan manajemen, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, penerapan prinsip *good corporate governance*, kepercayaan masyarakat, tingkat keuntungan investasi di pasar modal, minat usaha masyarakat, persaingan dengan bank lain dan lain sebagainya.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa pemeriksaan intern berpengaruh signifikan terhadap kontinuitas usaha, maka digunakan alat uji yaitu uji t. berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS didapat

nilai t hitung sebesar 5,965 sedangkan t tabel dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan sebesar $n-2 = 6-2 = 5$, yaitu sebesar 2,776. Sehingga dengan demikian, berdasarkan kaidah keputusan dimana :

Terima H_0 ,

bila $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

Tolak H_0 ,

bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Ternyata $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, yaitu $5,965 > 2,776$. Hal ini berarti koefisien korelasi signifikan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Pemeriksaan intern yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan kuesioner termasuk dalam kategori baik, karena unsur-unsur dari pemeriksaan intern yaitu independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksa intern, dan manajemen bagian pemeriksa intern telah diterapkan meskipun ada sebagian yang masih dirasa perlu peningkatan. Adapun pelaksanaan pemeriksaan intern yang dilakukan sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan relatif kecil.
2. Kontinuitas usaha yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan kuesioner termasuk dalam kategori baik, dikarenakan beberapa unsur penilaian kontinuitas usaha telah dapat dicapai secara baik. Terutama dalam trend negatif, petunjuk kemungkinan kesulitan keuangan, masalah intern, dan masalah luar yang terjadi. Sehingga kontinuitas usaha dapat dipertahankan.
3. Pengaruh pemeriksaan intern terhadap kontinuitas usaha yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil perhitungan statistik dan pengolahan data, antara pemeriksaan

intern dan kontinuitas usaha menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima, maka dapat disimpulkan "Pemeriksaan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kontinuitas Usaha". Sedangkan hasil koefisien determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pemeriksaan intern mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kontinuitas usaha di Bank Perkreditan rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Saran

1. Pelaksanaan pemeriksaan intern yang ada dalam perusahaan secara umum dapat dinilai cukup memadai, namun disisi lain masih tampak kekurangan-kekurangan dari sebagian bank seperti yang kadang melaporkan hasil pemeriksaannya kepada direktur utama dan merasa kurang perlu dengan adanya rotasi secara periodik dalam penugasan audit, kadang menggunakan berbagai prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat pada saat memverifikasi keberadaan suatu harta, dll. Hal-hal tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga tingkat pengendalian akan semakin baik.
2. Kontinuitas usaha yang ada dalam perusahaan sudah cukup memadai dan dapat dicapai secara baik, namun disisi lain masih tampak kekurangan-kekurangan dari sebagian bank seperti masih ada yang mengalami kerugian operasi, rasio keuangan penting yang jelek, kehilangan pelanggan/nasabah tertentu, dll. Hal-hal tersebut diharapkan dapat ditanggulangi sehingga kontinuitas usaha dapat dipertahankan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap indikator-indikator yang lebih variatif dengan sampel yang lebih banyak. Objek penelitian juga dapat dilakukan tidak hanya di perusahaan bank saja,

tapi dapat dicoba di perusahaan industri.

Surat Edaran Bank Indonesia. 1995.
Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern Bank.

Daftar Pustaka

- Achmad Buchori, Bambang Himawan, Edi Setiawan dan Nyimas Rohmah, *Kajian Kinerja Industri BPR Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 5 No.4, Maret 2003, Halaman 71.
- Akmal.2006. *Pemeriksaan intern (Internal Auditing)*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Amin Widjaja Tunggal.2006. *Internal Auditing (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo.
- Arens, Alvin A and Loebbecke.2003. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf. Jakarta : Salemba empat.
- Belkaoui, Ahmed R.2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hiro Tugiman.2003. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta : Kanisius.
- Husein Umar.2002. *Metoda Riset Bisnis*.Bandung : PT Gramedia
- Ikatan Akuntan Indonesia.2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____.2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi.2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwardjono.2005. *Teori Akuntansi, Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 8 Tahun 2003. Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1994, Pedoman Pemeriksaan Keuangan dan Operasional Bagi Sistem Pengendalian Intern BUMN/BUMD.